

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Dewan Terus Cecar Anggaran Formula E

JAKARTA—Di mata DPRD DKI kasus COVID-19 rupanya tidak menenggelamkan isu kasus Formula E. Komisi A DPRD DKI Jakarta membahas soal anggaran untuk Formula E di tengah pandemi virus Corona. Komisi A menyoroti langkah Pemprov DKI yang tetap mencairkan anggaran commitment fee sebesar Rp 200 miliar pada Februari. Padahal saat itu, Jakarta menghadapi ancaman wabah virus Corona.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, mendesak Pemprov DKI membuka kontrak penyelenggaraan Formula E. Dia menilai pembayaran pada Februari terlalu dipaksakan. "Adakah additional contract berisi, ya sudah ditunda, tapi bayar dulu separuh. Karena ini pakai uang rakyat sebaiknya kontraknya harus dibuka," ungkap Mujiyono dalam Rapat Komisi A DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (9/6/2020). Dia menekankan bahwa Pemprov DKI harus benar-benar terbuka soal anggaran.

Aapalagi di saat ini masyarakat kesulitan akibat dampak virus Corona. "Karena di situ semua jelas, berapa commitment fee, bagaimana penaltinya? Bagaimana kalau terjadi COVID-19? Kita harus tahu kenapa sih tetap dibayar di Feb-



Kalau sudah tahu, kenapa alokasi anggaran kita tidak kita fokuskan ke penanganan COVID-19. "

Gembong Warsono
Anggota Komisi A

ruari?" ucapnya lagi. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A Gembong Warsono. Dia mempertanyakan mengapa pembayaran tetap dilakukan bulan Februari, padahal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, sejak Januari sudah mengetahui wabah akan masuk ke Jakarta.

"Kalau sudah tahu (ada wabah COVID-19), kenapa alokasi anggaran kita tidak kita fokuskan ke penanganan COVID? Malah alokasi anggaran besar untuk Formula E," ujar Gembong. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta yang hadir dalam rapat, yakni Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lusiana Hendrawati. Lusi tak memberi jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan DPRD.

Menurut Dia, hal-hal terkait yang

ditanyakan oleh DPRD tidak bisa dijawab oleh BPKD. Itu berada di wilayah Dinas Pemuda dan Olahraga dan PT Jakpro sebagai penyelenggara. "KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Formula E khususnya commitment fee ada di Dinas Olahraga dan pelaksanaan ada di Jakpro. Jadi kerja samanya FWO dengan Jakpro," ucapnya. Lusi menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas memproses pencairan anggaran. Dalam hal ini, dokumen pencairan anggaran untuk Formula E untuk pembayaran commitment fee dinilai sudah terpenuhi, sehingga pihaknya melakukan pencairan.

"BPKD salah satu tugasnya adalah memproses pencairan anggaran dengan dasar apa yang sudah ada di DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Pada saat permohonan pencairan, itu akan

Bulan:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Dewan Terus Cengar Anggaran Formula E

dilakukan pencairan sepanjang semua dokumen pencairan sudah lengkap," jelasnya.

Usir Corona

Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andriano menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi menjadi langkah persiapan untuk menyempurnakan protokol kesehatan menuju normal baru.

"Jadi, peran semua pihak dibutuhkan untuk bisa mengusir Corona dari Ibu Kota," kata Wibi yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta di Jakarta. Hal tersebut, kata Wibi tidak lepas dari bukti tren menurunnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta setelah dilakukan PSBB selama tiga tahap yang menunjukkan cukup ampuhnya kebijakan itu dalam menekan penyebaran virus mematikan tersebut.

"Dengan PSBB Jakarta jilid III berakhir pada 4 Juni 2020, masih diperlukan perpanjangan PSBB untuk penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di DKI Jakarta, selama 14 hari hingga 18 Juni mendatang," ujarnya.

Akan tetapi dia menyayangkan sampai saat ini belum ada aturan resmi

dari Pemprov DKI Jakarta tentang masa perpanjangan PSBB pada masa transisi ini. "Oleh sebab itu kita masih menunggu aturan Pergub (peraturan gubernur) yang baru," ujarnya.

Ia juga menyampaikan tingkat kedisiplinan warga Jakarta sangat dibutuhkan dan dirinya sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah patuh mengikuti protokoler kesehatan selama ini. "PSBB jalan, tapi warganya bandel akan percuma dan tidak mungkin Jakarta bisa pulih," ucapnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan bulan Juni ini ditetapkan sebagai masa transisi.

Revisi Aturan

Masih menurut Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andriano, pihaknya mengusulkan agar Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju masyarakat, aman, sehat dan produktif.

Wibi, mengatakan usulan revisi tersebut soal adanya aturan ganjil bagi kendaraan roda dua. Menurut Wibi masalahnya kendaraan roda dua dalam ganjil

genap akan berdampak pada masyarakat menengah kebawah yang sebagian besar sebagai pekerja lapangan.

"Kami (Frkasi Nasdem) menyambut baik kebijakan Pak Anies mengeluarkan payung hukum pelaksanaan PSBB transisi. Namun kami akan mengkritisi kebijakan tersebut ketika ada masyarakat yang dirugikan," ujar Wibi.

Menurut Wibi, Nasdem menilai dampak kebijakan motor kena ganjil-genap pun bakal berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang di sektor transportasi massal. Penumpukan ini dinilai bahaya untuk kesehatan warga. "Kami kira Pemprov DKI cukup fokus dalam mengawasi protokol kesehatannya saja," tegasnya.

Menurut Wibi, saat ini perekonomian warga Jakarta sedang bergerak untuk bangkit. Karena itu, Wibi mengatakan tugas Pemprov DKI seharusnya memperketat protokol kesehatan dan mendidik warga. "Rakyat hari ini sedang kembali bergerak, dan itu juga akan berimplikasi pada perbaikan ekonomi. Tugas kita, pemerintah, adalah melakukan edukasi dan perketat protokol kesehatan yang sudah menjadi ketentuan," pungkasnya. (dni/ant)